

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Aurelia Carolla Nina Molan
@aurelyakarin@gmail.com
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTACT

This research aimed to examine the effect of implementation of accounting information system, participation of budget arrangement and functional supervision on performance of Surabaya Local Government Organization. The research was casual-comparative with quantitative approach. While, data collection technique used survey. Moreover, the data were primary with questionnaires as its instrument. Furthermore, the sampling technique used purposive sampling that is one of the non-probability. In line with, there were 96 respondents from 20 Surabaya Local Government as sample. Additionally. The data analysis technique used multiple linier regression with SPSS 23. The research result concluded the implementation of accounting information system had positive and significant effect on performance of Surabaya Local Government Organization. Likewise, participation of budget arrangement had positive and significant effect on performance of Surabaya Local Government Organization. Similarly, functional supervision had positive and significant effect on performance of Surabaya Local Government. These showed Surabaya Local Government had developed its performance for the target with very good accountability on budget arrangement and supervision.

Keywords: accaounting information system, participation of budget arrangement, functional supervision.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerpan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kasual komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer malalui penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling *non-probability*. Jumlah sempel pada penelitian ini sebanyak 96 responden dari 20 OPD Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa OPD Kota Surabaya memiliki peningkatan kinerja pemerintahan yang baik dengan pertanggungjawaban atas penyusunan anggaran dan pengawasan yang dinilai sangat baik dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, pengawasann fungsional.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi di era globalisasi mengalami kemajuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Suatu negara mempunyai pemerintah yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintah menurut peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah telah menerapkan tata kelola *Good Governance*, pemerintah daerah yang baik, dalam mewujudkan akuntabilitas publik harus menerapkan sistem informasi akuntansi. Mengingat sangat penting penerapan sistem

informasi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintah, maka apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai, mungkin instansi tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci, dan terstruktur. Sehingga penerapan sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh kinerja pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah, menganalisa serta mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan.

Partisipasi penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja pemerintah memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh dan transparan (Anwar dan Sumiati, 2014). Agar pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran sesuai dengan rencana organisasi pemerintah maka diperlukan kerja sama antara manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah. Dalam konteks organisasi pemerintah sangat dibutuhkan adanya partisipasi anggaran. Kegiatan proses penyusunan anggaran melibatkan pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan anggaran untuk mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan dari anggaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran, manajemen tingkat atas perlu memperhatikan aspirasi dari bagian-bagian organisasi secara menyeluruh sehingga para manajer tingkat bawah diharapkan mampu memberikan tanggungjawab serta kinerja untuk memperoleh keputusan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi.

Baswir (2000:128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan adanya pengawasan fungsional dapat menciptakan aparatur pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawah. Pengawasan fungsional, dimana pengawasan ini dilakukan oleh internal pemerintah daerah maupun eksternal pemerintah daerah (Baswir, 2000).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah? (2) Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah? (3) Apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi muncul dimana individu-individu bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Teori agensi disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi bertujuan untuk menyelesaikan masalah (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara prinsipal dan agen serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerja agen, (2) masalah pembagian resiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki perilaku yang berbeda terhadap resiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan preferensi risiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008:76).

Pada teori agensi yang menjelaskan tentang suatu hubungan agensi pemilik (*principal*) yang memberi mandat kepada pekerja (*agent*) ini juga terdapat pada akuntabilitas publik yang menurut Mardiasmo (2002:20), bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planing* suatu organisasi. Kriteria keberhasilan seseorang dapat diukur dengan kriteria yang ditentukan dan memiliki tolak ukur yang berupa tujuan-tujuan atau target-target yang ditentukan (Mahsun, 2006:25). Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam melaksanakan tugas keuangan Negara, membutuhkan yang namanya sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Informasi sebagai penentu dalam mengambil keputusan, baik dalam internal pemerintah maupun eksternal yang berkepentingan. Demikian informasi akuntansi, apabila disajikan dengan bertolak pada sistem yang andal tentu akan menghasilkan informasi yang objektif. Oleh sebab itu, penugasan penyusunan sistem informasi akuntansi hendaknya dilakukan dengan satu tujuan (Widjajanto, 2001). Sistem merupakan suatu rangkaian yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti mempunyai sub-sub sistem yang lebih kecil yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

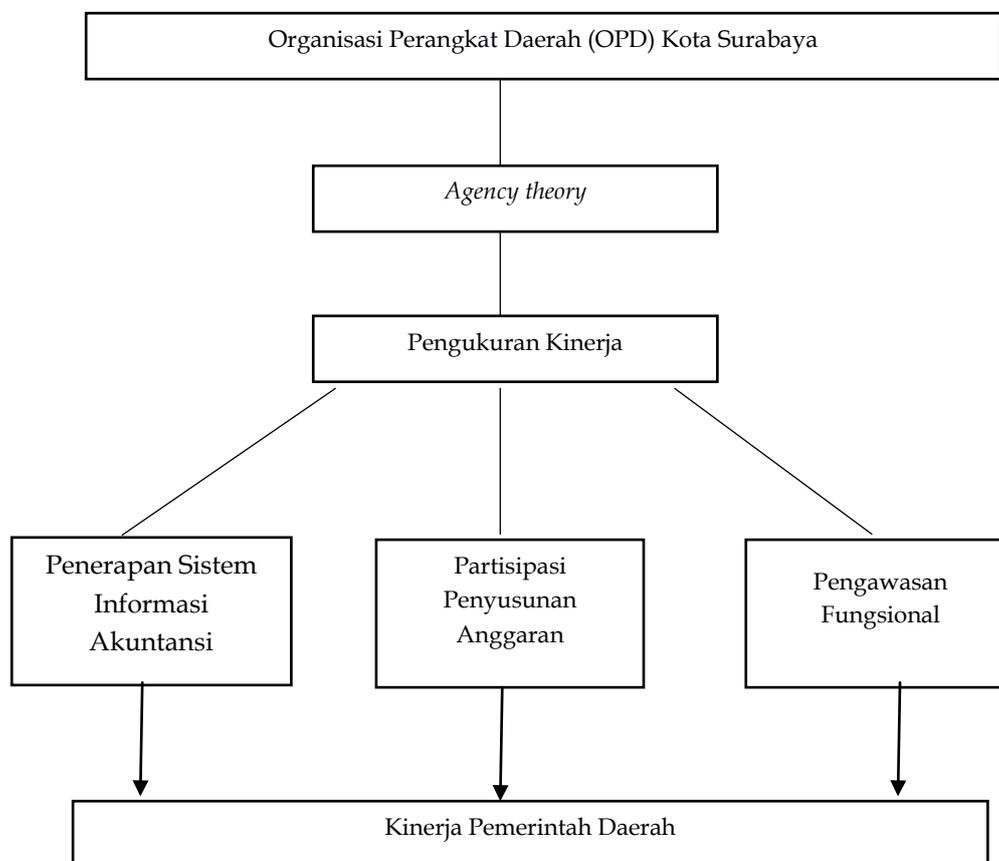
Partisipatif penyusunan anggaran merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian, maka dari itu cara mendapatkan anggaran, mengalokasikan, serta mengawasi diperlukan proses serta sistem yang mengarah pada partisipatif anggaran dan tidak didasarkan oleh kepentingan individu agar tidak menyebabkan persoalan, maka dari itu informasi pada pemerintah daerah berupa informasi pada tiap-tiap dinas. Indikator dari partisipatif penyusunan anggaran antara lain keterlibatan antara bawaan dan atasan, kepentingan berpendapat, kesedian berpendapat, kepuasan hasil akhir dan intensitas opini. Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, pelaksana harus sungguh-sungguh dan jeli dalam meningkatkan komitmennya. Anggaran dalam sektor pemerintah setelah disusun harus dipublikasikan kepada rakyat agar lebih transparan, dimana dari anggaran sektor publik didapatkan dari pajak, retribusi, laba pemerintah milik daerah maupun negara, pinjaman utang luar negeri dan obligasi (Anwar dan Sumiati 2014).

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi dan peran dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tujuan pengawasan fungsional untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah (Harvianda *et al.*, 2014).

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi merupakan komponen organisasi yang bertugas dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa serta mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan kepada pihak luar (Baridwan, 2010). Penerapan akuntansi pada pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja pemerintah dan kinerja individu dalam pemerintah daerah. Keberhasilan sistem informasi akuntansi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

H₁: Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah salah satu bentuk keterlibatan aparat pemerintah dalam suatu organisasi publik, untuk ikut serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran organisasinya. Dengan diikutsertakannya aparat tersebut dalam penyusunan anggaran akan mendorong aparat pemerintah untuk dapat bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diemban.

H_2 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) PP No. 79 tahun 2005 disebutkan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

H_3 : Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 20 Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini mempunyai variabel bebas maupun variabel terikat, pada variabel bebas terdapat penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, dan pengawasan fungsional. Sedangkan, pada variabel terikat terdapat kinerja pemerintah daerah.

Teknik Pengambilan Sempel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling *non-probability*. Purposive sampling digunakan karena informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan 20 dinas dari 22 dinas di OPD Kota Surabaya karena terhalang oleh ijin dari masing-masing kepala dinas. Kriteria pemilihan sampel responden yang diambil sebagai berikut: (1) Berdasarkan pertimbangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran di lingkungan OPD Kota Surabaya. (2) Dinas/badan yang berada pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 pasal 5. (3) Menduduki jabatan Kasubbag, staff atau kepala pimpinan dinas di OPD Kota Surabaya dan bekerja minimal 1 tahun

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yakni data primer. Data primer atau sumber data yang diberikan langsung oleh pemberi data atau responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini data primer dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner (Sugiyono, 2012:187). Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yakni pengumpul data atau peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden. Kuesioner dikirimkan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya agar dijawab kuesionernya sesuai petunjuk yang telah diberikan. Skala yang digunakan peneliti 1932 yakni skala likert. Sugiyono (2014) berpendapat bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena - fenomena sosial. Untuk dapat menganalisis masalah tersebut dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka peneliti memberikan angka atau skor pada jawaban: (1)

Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S), (5) Sangat Setuju (SS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan (intergritas) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar, 2008:72). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diambil dari penelitian Dita dan Putra (2016). Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi, yaitu: (1) Pemahaman tentang sistem informasi akuntansi. (2) Memudahkan dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi. (3) Kebenaran tentang informasi yang diberikan. (4) Kecepatan dan ketepatan. (5) Wewenang dalam penggunaan sistem

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran yang dimaksud adalah keterlibatan bawaan dalam pemberian pertimbangan dan usulan pengambilan keputusan, mempersiapkan dan mengrevisi anggaran. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Syaifudin (2017). Indikator pengukuran variabel dikembangkan yaitu: (1) Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran. (2) Kualitas pemikiran yang diberikan kepada anggaran yang disusun. (3) Frekuensi menyatakan usulan pendapat tentang anggaran (4) Pengaruh pemikiran yang diutarakan terhadap anggaran yang disusun. (5) Frekuensi kontribusi dalam mengutarakan pendapat

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan berkesinambungan untuk mengetahui, memahami dan menilai suatu kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah penyimpangan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang di ambil dari penelitian Syaifudin (2017) Indikator pengawasan fungsional yang dikembangkan yaitu: (1) Pelaksanaan pemeriksaan (2) Laporan pemeriksaan (3) Tindak lanjut pemeriksaan

Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat tercapainya kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala *likert*. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diambil dari penelitian Lubis (2011). Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi kinerja pemerintah, yaitu: (1) Kualitas kerja (2) Ketepatan waktu (3) Inisiatif (4) Kemampuan (5) Komunikasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid apabila suatu kuesioner terdapat yang mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan *degree of freedom* (df) = jumlah konstruk (n)-2. Berikut analisis pengujian validitas (Ghozali, 2016: 52) yaitu: (a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai r bernilai positif, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan nilai r bernilai negatif, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan

sempele sebanyak 96 responden. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana *degree of freedom* (df) = N-2 jadi 96-2 = 94 dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,202. Berdasarkan uji validitas dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	PSIA 1	0,515	0,202	Valid
	PSIA2	0,596	0,202	Valid
	PSIA3	0,366	0,202	Valid
	PSIA4	0,436	0,202	Valid
	PSIA5	0,300	0,202	Valid
	PSIA6	0,457	0,202	Valid
	PSIA7	0,466	0,202	Valid
Partisipasi Penyusunan Anggaran	PPA1	0,410	0,202	Valid
	PPA2	0,482	0,202	Valid
	PPA3	0,595	0,202	Valid
	PPA4	0,542	0,202	Valid
	PPA5	0,279	0,202	Valid
Pengawasan Fungsional	PF1	0,442	0,202	Valid
	PF2	0,531	0,202	Valid
	PF3	0,526	0,202	Valid
	PF4	0,454	0,202	Valid
	PF5	0,662	0,202	Valid
	PF6	0,462	0,202	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah	KPD1	0,739	0,202	Valid
	KPD2	0,569	0,202	Valid
	KPD3	0,513	0,202	Valid
	KPD4	0,292	0,202	Valid
	KPD5	0,708	0,202	Valid
	KPD6	0,739	0,202	Valid
	KPD7	0,284	0,202	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yakni $r_{hitung} > 0,202$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Menurut Ghazali (2016) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *Alpha* lebih dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variable penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *Cronbach's Alpha* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	0,657	0,6	Reliabel
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,621	0,6	Reliabel
Pengawasan Fungsional	0,688	0,6	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0,722	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 atau $>0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa data kuesioner dalam penelitian ini sudah dapat dipercaya (Reliabel). Dengan demikian syarat reliabilitas sudah terpenuhi.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini responden diminta untuk memberikan penilaian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional dan kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan skala *Likert*. Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Gambaran suatu data dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSIA	96	3.43	4.86	4.2812	.2815
PPA	96	3.40	4.80	4.2250	.3142
PF	96	3.17	5.00	4.1701	.3793
KPD	96	3.29	5.00	4.1592	.3810
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (PSIA) mempunyai nilai *mean* sebesar 4,2812. Nilai *mean* (rata-rata) mengindikasikan bahwa responden menerapkan sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengolah data keuangan dengan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dikatakan jika penerapan sistem informasi akuntansi di OPD Kota Surabaya cukup baik. (2) Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) mempunyai nilai *mean* sebesar 4,2250. Nilai *mean* (rata-rata) mengindikasikan bahwa responden membutuhkan partisipasi penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat dikatakan jika partisipasi penyusunan anggaran di OPD Kota Surabaya cukup baik. (3) Variabel Pengawasan Fungsional (PF) mempunyai nilai *mean* sebesar 4,1701. Nilai *mean* (rata-rata) mengindikasikan bahwa responden membutuhkan pengawasan fungsional dalam mempersiapkan pemeriksaan dengan baik sesuai dengan undang-undang untuk dasar

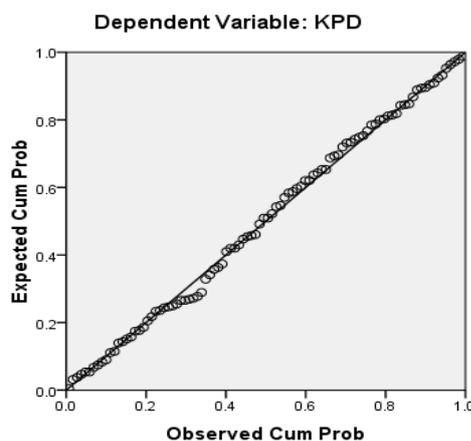
pemeriksaan, sehingga dapat dikatakan jika pengawasan fungsional di OPD Kota Surabaya cukup baik. (4) Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) mempunyai nilai *mean* sebesar 4,1592. Nilai *mean* (rata-rata) mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kepercayaan terhadap kinerja yang sudah tersistem dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan jika kinerja pemerintah daerah di OPD Kota Surabaya cukup baik

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan melalui analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Model regresi yang baik adalah distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti Gambar 2 sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2

Uji Normalitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya dilihat dari *Normal Probability Plot* namun dapat dilihat pada perhitungan statistik dengan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-smirnov* (K-S), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil uji normalitas
One-sample kolmogrov-smirnov test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67767817
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.037
Kolmogorov-Smirnov Z		.579
Asymp. Sig. (2-tailed)		.890

a. Test distribution is Normal.

Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,890 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas Ghozali (2016). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance (TOL)*. Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 sedangkan nilai TOL lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Berikut ini hasil pengujian multikolinieritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PSIA	.602	1.660
PPA	.577	1.732
PF	.940	1.064

a. Dependent Variable :KPD

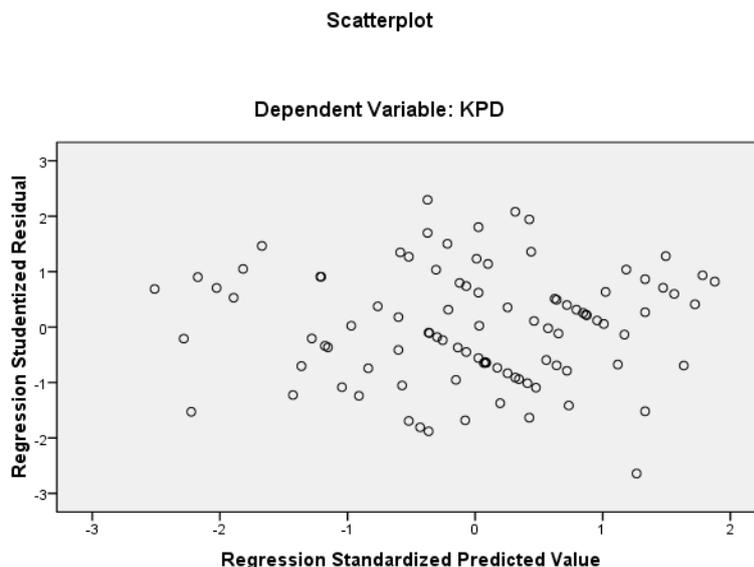
Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui dengan melihat hasil perhitungan nilai *tolerance (TOL)* $> 0,10$ dan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residul dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Berikut hasil uji

heteroskedastisitas dapat dilihat pada perhitungan statistik yang tertera pada gambar berikut:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3, grafik tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas serta telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian, data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah di isi 96 responden yang diajukan kepada OPD Kota Surabaya. Dan telah diolah data jawaban kuesioner dengan menggunakan SPSS versi 23. dengan model persamaan sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + b_1PSIA + b_2PPA + b_3PF + e$$

Dimana :

- KPD : Kinerja Pemerintah
- α : Konstanta
- $b_1b_2b_3$: Koefisien regresi dari variabel independen
- PSIA : Penerapan sistem informasi akuntansi
- PPA : Partisipasi penyusunan anggaran
- PF : Pengawasan fungsional
- e : error

Berikut hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.539	3.146		2.396	.019
	PSIA	.294	.114	.222	2.571	.012
	PPA	.927	.147	.559	6.327	.000
	PF	.161	.079	.141	2.037	.045

a. Dependent Variable : KPD

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat diprediksi kinerja pemerintah daerah dapat dimasukkan kedalam regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{KPD} = 7,539 + 0,294 \text{ PSIA} + 0,927 \text{ PPA} + 0,161 \text{ PF} + \varepsilon$$

Persamaan regresi yang dapat menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional memiliki koefisien regresi bertanda positif, berikut penjelasan regresi diatas: (1) Nilai konstanta (α) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui memiliki konstanta sebesar 7,539 karena konstanta bertanda positif menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (PSIA), Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA), Pengawasan Fungsional (PF) bernilai konstanta maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 7,539. (2) Koefisien regresi penerapan sistem informasi akuntansi (b_1) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_1 adalah 0,294 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan apabila penerapan sistem informasi akuntansi semakin baik maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. (3) Koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaran (b_2) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_2 adalah 0,927 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan apabila partisipasi penyusunan anggaran semakin baik maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. (4) Koefisien regresi pengawasan fungsional (b_3) Persamaan regresi linier berganda dapat diketahui besarnya b_3 adalah 0,161 yang artinya menunjukkan arah positif atau searah antara pengawasan fungsional dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan apabila pengawasan fungsional semakin baik maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Uji Kelayakan Model

Uji F digunakan menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji F sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan uji F > 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya. (b) Jika nilai signifikan F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377.571	3	125.857	43.304	.000 ^a
	Residual	267.387	92	2.906		
	Total	644.958	95			

a. Dependent Variable : KPD
 Predictors: (Constant), PSIA, PPA, PF
Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 43,625 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Berikut hasil Uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.572	1.70481

a. Predictor : (constant), PSIA, PPA, PF
 Dependent variable : KPD

Sumber : data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi *R-Square* sebesar 0,585 atau 58,5 %, maka ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional menjelaskan variabel kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 58,5 % sedangkan sisanya 41,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistika t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen dengan menanggapi variabel independen lainnya konstan (Ghozali 2016:97). Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: (a) Jika angka probabilitas signifikansi uji t $> 0,05$ maka, hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara uji t, variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika angka probabilitas signifikansi uji t $< 0,05$ maka, hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Berarti secara uji statistik t, variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji hipotesis (Uji t) dapat dilihat pada perhitungan statistik pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	7.539	3.146	2.396	.019
	PSI	.294	.114	2.571	.012
	PPA	.927	.147	6.327	.000
	PFS	.161	.079	2.037	.045

a. Dependen variabel: KPD

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil uji t dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: (1) Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,012 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,0045 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis bahwa penerapan sistem informasi akuntansi menunjukkan arah positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_1 dapat diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi di lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Dewi *et al.*, (2015), menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa hubungan penerapan sistem informasi akuntansi dan kinerja pemerintah daerah adalah searah. Jika penerapan sistem informasi akuntansi semakin tinggi maka kinerja pemerintah daerah juga semakin tinggi. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi OPD untuk mengerti dan memperediksi sistem tersebut. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ke dua (H_2) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_2 dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk bertanggung

jawab terhadap tugas masing-masing sehingga meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Rahayu *et al.*, (2014) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Partisipasi akan meningkatkan kinerja pemerintah apabila aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran maka tujuan sasaran anggaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, maka H_3 dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa pengawasan fungsional telah mempersiapkan pemeriksaan dengan baik berdasarkan undang-undang untuk dasar pemeriksaan serta adanya pengawasan internal maupun eksternal agar kinerja menjadi baik sesuai peraturan yang ditetapkan. Semakin tinggi pengawasan fungsional di dalam lingkup pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Harvianda *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah dapat mengarahkan aparat pemerintah pada pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji penerapan sistem informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hasil kuesioner yang dibagikan kepada organisasi perangkat daerah Kota Surabaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik untuk meningkatkan kinerja dengan mempermudah pekerjaan karyawan. (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran. (3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Keterbatasan

Obyek dalam penelitian ini hanya berkisar pada dinas yang merupakan bagian dari OPD Kota Surabaya yang sebenarnya dapat diperluas dengan penelitian yang mencakup semua bagian OPD Kota Surabaya.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian dengan memperbanyak jumlah tidak terbatas hanya dinas namun perangkat daerah lainya seperti inspektorat, kecamatan atau mengganti lingkup kota menjadi provinsi.

(2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah misalnya ketepatan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S.M. dan Sumiati. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo). *Jurnal Akuntansi* 1(2).
- Azhar, S. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Cetakan Pertama. Bandung: Lingga Jaya
- Baridwan, Zaki. 2010. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi kelima. BPPE. Yogyakarta.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. BPPE. Yogyakarta.
- Dewi, M.S., A.S Dharmawan. dan S. Werastuti. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi* 3(1).
- Dita, M.A. dan I. W. Putra. 2016. Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel moderisasi. *Jurnal Akuntansi* 15(1):614-640.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harvianda, Y.P., R.A.S Surya. dan N. Azlina. 2014. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal JOM FEKOM* 1(2).
- Ikhsan, A. dan H.B. Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi Dan Riset Multiparadigma*. Edisi pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Latan, dan Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SSPS 20,0*. Bandung: ALFABETA
- Lubis, H.P. 2011. Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Lukiman R.H. Dan J.W. Lestarianto W. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi, Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu Karyawan (Studi Empiris Pada perusahaan Manufaktur di Wilayah Tangerang). *Jurnal Ultima Accounting* 8(2).
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPPE. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemerinth Daerah.
- Rahayu, N. L., Sulindawati N. L.G. dan Sinarwati. K. D. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* 2(1)
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business: Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 1*. Edisi 4. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Syaifudin, M. 2017. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Fungsional, dan Penerapan

Sistem Informasi Akuntansi yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Institut Agama Islam Yogyakarta. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Otonomi Daerah*.

Widjajanto, N. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.